

### **BAB 3**

#### **PENDIDIKAN POLITIK PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA (PSII) CABANG KABUPATEN GARUT PADA TAHUN 1959-1965**

##### **3.1 Pendidikan Politik Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Kabupaten Garut Pada Tahun 1959-1965**

Pendidikan politik adalah proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya<sup>1</sup>. Sejak berdiri tahun 1905 ketika masih menggunakan nama Sarekat Dagang Islam, lalu berubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911, dan terakhir menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930 telah giat bermain politik untuk kepentingan umat agar terlepas dari belenggu penjajahan Belanda. Bukan hanya itu, PSII juga berdiri atas dasar ketidaksenangannya terhadap orang-orang Cina yang menghinakan kaum bumiputera, politik kristenisasi, serta kecurangan dari para Ambtenar bumiputera dan Eropa<sup>2</sup>. Pada Kongres Syarikat Islam (SI) yang ketiga atau Kongres Nasional Pertama tanggal 17-24 Juni 1916, di Kota Bandung. H.O.S Cokroaminoto sebagai pimpinan Kongres pernah mengatakan dalam rapat tersebut ingin mendirikan sebuah pemerintahan sendiri, yaitu pemerintahan dimana Ratu Wilhelmina memandang perlu agar tiap-tiap keresidenan atau bagian daerah membuka kemungkinan untuk mencapai pemerintahan sendiri<sup>3</sup>. Pidato Cokroaminoto tersebut membuktikan bahwa politik dan PSII tidak dapat dipisahkan. PSII seperti virus kebaikan yang terlahir sebagai pandemi dan meluas secara horizontal jauh ke seluruh wilayah Nusantara. PSII adalah organisasi massa yang pengaruhnya sangat terasa dalam politik Indonesia. Berhasil menyentuh sampai lapisan masyarakat terbawah yang sejak lama tidak pernah mengalami perubahan kehidupan sosial, agama, dan politiknya.

Pendidikan politik di PSII sangat besar pengaruhnya terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda. Beberapa orang yang menjadi pembesar Republik Indonesia di kemudian hari adalah para alumni

---

<sup>1</sup> Affandi, 2011:3.

<sup>2</sup> Notosusanto, 2008:343.

<sup>3</sup> Anhar, 1985:37.

pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PSII seperti Sukarno, Semaoen, dan Kartosuwiryo yang langsung dibawah pengajaran Cokroaminoto. Tan Malaka yang kita kenal sebagai orang besar di tubuh PKI ternyata pernah melaksanakan pengajaran politik di sekolah-sekolah milik Sarekat Islam, bahkan memimpin satu sekolah milik SI cabang Semarang pada tahun 1921<sup>4</sup>. Kepemimpinan Tan Malaka di sekolah SI cabang Semarang ternyata berhasil. Perbedaan yang signifikan diantara sekolah yang diselenggarakan SI dengan sekolah Belanda adalah biaya sekolah yang lebih murah, pelajaran yang diterima jauh lebih baik, serta situasi pembelajaran di dalam kelas jauh lebih sehat dan dekat dengan budaya ketimuran kita<sup>5</sup>. Sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh SI pada saat itu lebih dikenal oleh masyarakat sebagai kursus-kursus politik. Istilah sekolah menjadi kursus politik ini akan bertahan terus sampai masa Orde Lama selesai. Ada tiga pokok utama tujuan diselenggarakannya pendidikan politik SI pada saat itu:

1. Memberi bekal yang cukup agar anak didik dapat mencari penghidupan yang layak dalam dunia kapitalis.
2. Memberikan hak kepada anak didik untuk bersukaria melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan.
3. Menunjukkan kewajibannya terhadap berjuta-juta rakyat kelas bawah<sup>6</sup>.

Pada tujuan yang pertama, Sarekat Islam membekali para anak didik dengan pelajaran berhitung, membaca, menulis, bahasa Melayu, dan sejarah meskipun pabrik-pabrik yang ada tidak terlalu suka dengan anak didik yang pandai demikian. Pengantar dalam kursus politik yang diselenggarakan SI adalah Jawa atau Melayu agar tidak terjadi sebuah penghalang dalam pengajaran. Jadwal pelajaran pun dihilangkan, sehingga anak didik belajar sesuai dengan kemampuannya secara mandiri.

Tujuan kedua memiliki arti bahwa beban kehidupan orang-orang pada masa itu tidak sesuai dengan umurnya. Anak didik banyak yang sekolah sambil menjadi buruh di pabrik gula yang siang-malam terus bekerja. Dampak dari hal

---

<sup>4</sup> *op.cit*

<sup>5</sup> Malaka, 1921:3.

<sup>6</sup> *op.cit*

ini adalah kurangnya waktu untuk bermain, berkumpul, dan mengatur kehidupan berkelompok yang lebih baik. Anak didik yang ada di Sekolah-sekolah SI dituntut untuk bisa secara mandiri mendirikan kelompok-kelompok kecil seperti komite kebersihan, komite perpustakaan, komite olahraga, dan sebagainya. Pendidik dalam pembentukan kelompok-kelompok tersebut tidak ikut campur karena menghindari pendiktean.

Tujuan ketiga adalah yang paling utama dan sulit dilaksanakan sehingga ditaruh diposisi terakhir. Sekolah-sekolah Belanda mengajarkan bahwa kehidupan sosial di Hindia Belanda terdapat dua kelas yaitu kelas bawah dan kelas atas. Golongan atas diisi oleh orang-orang Belanda dan para priyayi, sedangkan golongan bawah diisi oleh kaum buruh dan tani yang disebut oleh Cokroaminoto sebagai kaum *mustadh'afin*<sup>7</sup>. Sekolah-sekolah Belanda tidak pernah menjelaskan kenapa kelas tersebut bisa lahir, sehingga ketika anak didik sudah besar, ia tidak akan tahu kenapa seseorang berada di kelas bawah atau atas, atau malah menganggap bahwa hal tersebut adalah sifat bawaan dari masing-masing. Didikan di SI akan melahirkan cinta serta kesadaran untuk dapat mengubah derajat rakyat.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) masuk ke Kabupaten Garut pada tahun 1914 yang dibawa langsung oleh Cokroaminoto. Peresmian berdirinya PSII di Kabupaten Garut adalah diselenggarakannya *Openbaar Vergadering*<sup>8</sup> di alun-alun Kabupaten untuk sosialisasi program-program PSII yang akan dijalankan dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Garut dengan ditutup oleh kegiatan sunatan massal<sup>9</sup>. *Openbaar Vergadering* ini dipimpin langsung oleh Cokroaminoto dan menunjuk Raden Sastrawiguna, Yahya, dan Utar Djuned sebagai pimpinan PSII cabang Kabupaten Garut. Kharisma yang dibawa oleh Cokroaminoto berhasil menarik minat massa untuk masuk ke

---

<sup>7</sup> *Mustadh'afin* adalah orang-orang yang dilemahkan oleh tatanan kehidupan sosial. Allah dalam Al Qur'an mengatakan bahwa kita harus membela orang-orang yang dilemahkan keadaan, sebab pembelaan kita terhadap siapa pun yang dilemahkan adalah sebuah bentuk keimanan.

<sup>8</sup> *Openbaar Vergadering* adalah istilah rapat akbar pada masa Hindia Belanda sampai Indonesia merdeka. Digunakan oleh semua organisasi pergerakan yang dipelopori oleh Sarekat Islam.

<sup>9</sup> Suhardiman, 2018:38

dalam PSII Kabupaten Garut. Progres yang luar biasa untuk ukuran organisasi yang baru memasuki wilayah baru. Cokroaminoto tidak selesai di alun-alun Garut. Safari politiknya terus dilakukan mengelilingi Kabupaten Garut sembari berguru kepada salah satu Kyai yang ada di Desa Tanggulun, Kecamatan Kadungora, yaitu Kyai Abbas<sup>10</sup>.

Kelahiran PSII di Kabupaten Garut membawa pembaharuan dalam gerakan dan pemikiran melawan segala bentuk kesewenangan Belanda. Kyai-kyai PSII pada saat itu telah menggunakan hadist Nabi yang artinya setiap hal yang baru dalam agama adalah sebuah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah neraka sebagai fatwa untuk menggerakkan masyarakat membangkang terhadap perintah Belanda. Menurut para pemuka agama pada saat itu, semua peraturan pemerintah kolonial seperti pajak wajib ditolak karena masalah baru dalam urusan agama<sup>11</sup>. Paham seperti ini sampai dan dipegang teguh oleh masyarakat yang ada di kampung-kampung. Implementasi pertama dari pendidikan politik PSII yang menggemparkan adalah peristiwa Cimareme yang muncul dari gerakan radikal SI Afdeling B pada Juni 1919<sup>12</sup>. Peristiwa ini didasari oleh penolakan yang dilakukan K.H. Hasan untuk menjual hasil panennya sebanyak 42 kwintal kepada pemerintah. K.H. Hasan meninggal diujung pistol tentara Belanda.

Dampak dari peristiwa Cimareme terhadap PSII adalah banyak tokoh penting yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara. K.H. Mustafa Kamil menjadi salah satunya. Ketika peristiwa itu terjadi, jabatan seksi propaganda dipegang oleh K.H. Mustafa Kamil. Kepiawannya dalam berpidato, melakukan propaganda, serta ditunjang oleh pengetahuan agama yang luas menjadi dasar penangkapan. K.H. Mustafa Kamil mendekam di jeruji besi selama dua tahun dari 1919 sampai 1921<sup>13</sup>.

PSII cabang Kabupaten Garut pada tahun 1922 mendirikan sebuah sekolah dengan nama Broederschap Onderbouw SI di Jalan Mandalagiri. Sekolah yang didirikan PSII ini semakin membuat progresif pola pendidikan politik untuk

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mulyana (84 tahun)

<sup>11</sup> Iskandar, 2001:147.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> SII Cabang Garut, 16.

masyarakat. Terbukanya pemahaman dan pemikiran baru membuat sebagian anggota PSII menghentikan aktifitasnya. Mereka lebih tertarik membuat wadah pergerakan baru seperti H.M. Djamhari mantan anggota PSII yang mendirikan Muhammadiyah di Kabupaten Garut pada tahun 1922, dan Kyai Sukantawijaya mendirikan Persatuan Islam di Kabupaten Garut pada tahun 1929<sup>14</sup>. Lahirnya organisasi-organisasi keagamaan diluar PSII membuat pergerakan di Kabupaten Garut terpolarisasi menjadi dua kelompok yang berbeda: tradisional dan reformis.

K.H. Mustafa Kamil selaku Ketua PSII cabang Kabupaten Garut merespon terjadinya polarisasi di dalam pergerakan pada saat itu dengan mengusulkan untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama Al-Muwafaqoh yang diketuai oleh K.H. Badruzzaman, sekretarisnya H. Sanusi, dan penasihatnya adalah K.H. Mustafa Kamil<sup>15</sup>. Tujuan organisasi ini adalah untuk mempersatukan seluruh ulama di Kabupaten Garut agar satu tujuan, yaitu melawan kolonialisme Belanda. Program pertama Al Muwafaqoh adalah bekerja sama dengan PSII cabang Kabupaten Garut untuk mengadakan *Openbaar Vergadering* di Masjid Ciledug. Program ini terlaksana dengan baik, namun dampak lainnya adalah seluruh pimpinan Al Muwafaqoh dan PSII ditangkap polisi Belanda dengan tuduhan melakukan persiapan untuk menciptakan kekacauan dan menjatuhkan pemerintah. Para tokoh ini dihukum tiga bulan penjara. Al Muwafaqoh dan PSII cabang Kabupaten Garut sendiri non-aktif tidak lama setelah para tokoh keluar dari penjara dan Kabupaten Garut diduduki oleh Jepang. PSII cabang Kabupaten Garut mengalami mati suri selama kependudukan Jepang di Indonesia akibat kerasnya aturan Jepang terhadap organisasi yang berpotensi mengganggu kekuasaan.

PSII menampakan eksistensinya ketika Maklumat Pemerintah Nomor X pada tanggal 3 November 1945 direspon oleh kalangan Islamis untuk mendirikan satu partai Islam yang merepresentasikan semua golongan, yaitu Masyumi. Masyumi adalah representasi partai-partai politik Islam hasil dari Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Badruzzaman, 2007:27.

1945 yang didalamnya terdapat PSII, Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PERSIS, dan lain-lain.

Masyumi yang diisi oleh berbagai golongan Islam ternyata tidak cukup bisa mewakili suara semua golongan Islam, sehingga melahirkan konflik elit didalamnya. PSII pada bulan Juli 1947 menarik dukungan dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik yang berdiri sendiri<sup>16</sup>. PSII mengambil tindakan ini untuk masuk ke dalam kabinet Amir Syariffudin, sedangkan Masyumi pada saat itu menolak masuk kabinet. Langkah PSII dianggap tepat dengan perhitungan politik kedepannya, bahwa PSII harus mengambil peran dipemerintahan. NU beberapa tahun kemudian menyusul PSII keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik mandiri.

Tahun 1955 Pemilihan Umum pertama dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat di DPR dan MPR. PNI keluar sebagai pemenang pemilu. PSII meskipun organisasi tertua yang seharusnya bisa berbicara banyak di kancah politik nasional ternyata harus puas berada di urutan kelima. Penyebabnya adalah PSII terlalu banyak menghadapi trauma dan konflik politik. Perseteruan dengan PKI pun belum pernah berakhir. Pasca dilantiknya MPR dan DPR, mereka memiliki tugas untuk merumuskan dasar negara. Perumusan dasar negara ini menimbulkan konflik persidangan yang sangat lama. Fraksi menjadi terbelah tiga: pengusung dasar negara Islam, Pancasila, dan sosio-ekonomi. Sidang menjadi sangat alot sampai pada akhir 1958 dasar negara belum ditentukan. Sukarno membaca hal tersebut sebagai peluang untuk menerapkan gagasannya yang selama ini diimpi-impikan, yaitu Demokrasi Terpimpin. Langkah yang diambil Sukarno adalah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Konsituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPRS yang dipilih langsung oleh Presiden.

PSII merespon hal ini dengan penuh kebimbangan antara menerima Demokrasi Terpimpin yang artinya satu barisan dengan PKI, atau menolak lalu dibubarkan seperti Masyumi. Pada akhirnya dalam beberapa keputusan politiknya, PSII lebih banyak mengekor pada NU. Politik dua kaki yang diterapkan oleh PSII adalah untuk mengamankan organisasi supaya tidak

---

<sup>16</sup> Ma'arif, 1985:115.

bernasib sama dengan Masyumi, juga untuk menghalau paham komunisme yang semakin hidup di masyarakat.

Pasca diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, langkah-langkah politik PKI mulai mencemaskan golongan Islam. Menjelang 1960, PKI membentuk sebuah badan otonom organisasi yang bertugas khusus menginfiltrasi golongan Islam, yaitu Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Solo dipimpin oleh K.H. Sirat<sup>17</sup>. K.H. Sirat memimpin Ikhwanul Muslimin tanpa tahu garis-garis perjuangan PKI yang berdasarkan Marxisme-Lennisme, karena hanya melihat PKI sebagai bagian dari organisasi yang ikut berjuang pada masa penjajahan.

PSII menerima tantangan bukan hanya dari PKI yang membentuk badan otonom Ikhwanul Muslimin, tetapi juga dari gerakan Darul Islam. Meskipun hubungan PSII dengan DI/TII tidak seperti dengan PKI yang menjadi musuh bebuyutan, tetapi PSII selalu menanamkan kepada anggota dan masyarakat bahwa cita-cita organisasi bukan untuk mendirikan negara Islam seperti yang sedang diperjuangkan DI/TII, melainkan cukup mendirikan sebuah negara yang berisikan dunia Islam tidak peduli bentuknya Republik, Kerajaan, atau Monarki.

PSII mengambil langkah dengan menyelenggarakan pendidikan politik untuk anggota dan masyarakat. Pola yang tidak asing bagi PSII karena pernah digunakan pada masa pergerakan sampai selesainya kolonialisasi Belanda pada tahun 1942. Pendidikan politik yang diselenggarakan PSII sangat masif dan terstruktur sebagai usaha menandingi dan menentang PKI, serta membentengi anggota agar terus loyal dan patuh dalam menjalankan cita-cita organisasi. PSII cabang Kabupaten Garut tercatat sebagai cabang yang paling intensif dan unggul dibanding cabang-cabang lain dalam melakukan proses sampai hasil dari pendidikan politik. Tempat pelaksanaan pendidikan politik PSII adalah di jalan Bank nomor 14.

### **3.2 Bentuk Pendidikan Politik Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Kabupaten Garut Pada Tahun 1959-1965**

PSII sangat bersikap hati-hati dalam merespon situasi politik yang ada. Dampak dari sikap terlalu hati-hati dalam mengambil sikap adalah

---

<sup>17</sup> Mudatsir, 2008:117.

perkembangan organisasi di Kabupaten Garut mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan NU yang lebih terbuka<sup>18</sup>. Ketertinggalan yang dimaksud adalah dalam hal kuantitas organisasi. Meskipun demikian, PSII dan NU dalam melaksanakan respon dari situasi politik yang ada sering bersinergi. Tidak jarang PSII dan NU dipertemukan dalam sebuah mimbar akbar yang berisikan materi-materi politik anti-tesis dari pergerakan Darul Islam dan PKI karena keduanya berada di dalam satu barisan, yaitu mendukung Demokrasi Terpimpin melalui Liga Muslimin Indonesia.

PSII di Kabupaten Garut memiliki basis massa di daerah-daerah pinggiran kota. Bahkan, pusat pendidikan politik yang diselenggarakan PSII ada di pengurus anak cabang sampai ranting. Bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PSII ada dua: kursus politik dan tablig akbar atau mimbar bebas. Bentuk pendidikan politik seperti ini tidak asing digunakan oleh PSII. Ketika Cokroaminoto menyebarkan PSII di Kabupaten Garut juga menggunakan pola yang sama. Letak perbedaannya adalah musuh pada konstelasi politik lokal mau pun nasional bukan orang yang datang dari bangsa lain, tetapi PKI dan Darul Islam.

PSII dengan latar belakang Islam dan memiliki jaringan ulama pada saat itu memiliki keuntungan karena memasuki tahun 1960 hampir setiap kecamatan ada pesantren yang mau mengadakan pendidikan politik dengan garis perjuangan PSII dalam bentuk kursus politik atau pun tablig akbar. Pesantren tersebut diantaranya adalah Pondok Pesantren Urug pimpinan K.H. Bakri, Pondok Pesantren Darussalam pimpinan K.H. Yusuf Taojiri, Pondok Pesantren Ciasem, Pondok Pesantren An-Nur di Malangbong, Pondok Pesantren Al-Falah Biru pimpinan K.H. Badruzaman, Pondok Pesantren Hidayatul Faizan pimpinan K.H. Siradz, dan Pondok Pesantren Al-Huda pimpinan K.H. Sirad<sup>19</sup>.

Panduan serta materi yang disampaikan bersumber dari buku Tafsir Program Asas dan Program Tandhim karya Cokroaminoto yang ditulis pada tahun 1931 di Bogor. Di dalam buku tersebut ditulis sikap-sikap yang harus diambil PSII dalam situasi dan kondisi apa pun seperti sikap persatuan ummat

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hidayat (80 tahun)

<sup>19</sup> Diktat Sejarah Pesantren Urug, 1986:23

Islam, kemerdekaan umat, sifat pemerintahan, kehidupan ekonomi, kesamaan derajat manusia, politik, dan lain-lain.

PSII dalam menyikapi Darul Islam dalam kursus politik atau tablig akbar yang diselenggarakan selalu membawa ayat Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat ke 38 yang artinya mereka itu (kaum Muslimin) yang menerima panggilan Tuhannya dan menjalankan Shalat, serta urusan pemerintahannya (didirikan atas) musyawarah diantara mereka itu, dan membelanjakan apa-apa yang kami telah berikan. Menurut penafsiran orang-orang PSII bahwa pemerintahan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah pemerintahan yang kekuasaannya bersandar kepada kemauan rakyat dalam suatu majelis permusyawaratan atau parlemen yang menyusun hak dan kewajibannya berdasarkan asas-asas demokrasi yang seluas-luasnya. Tidak dispesifikasikan berbentuk negara Islam<sup>20</sup>.

Teori propaganda memandang bahwa bentuk pendidikan politik dengan menggunakan kursus politik atau tablig akbar dipandang ideal bagi masyarakat Kabupaten Garut. Opini yang dibangun dengan menggunakan permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut seperti ancaman PKI dan Darul Islam yang ingin mendirikan negara dengan bentuk sesuai ideologinya hanya untuk tujuan dan target politik semata<sup>21</sup>. PSII cabang Kabupaten Garut juga mengklaim bahwa propaganda yang dilakukan dalam bentuk pendidikan politik adalah bersifat *white propaganda*, yaitu propaganda yang dilakukan dengan cara jujur dan benar<sup>22</sup>. Materi yang disampaikan sangat jelas dari mulai alasan sampai dampak dari tindakan dijelaskan secara terbuka, contohnya adalah PSII merasa sangat keberatan ketika PKI melahirkan sayap organisasi keagamaan dengan nama Ikhawanul Muslimin pada awal tahun 1960. PSII cabang Kabupaten Garut bereaksi dengan melakukan gerakan pemberian pemahaman tentang isu tersebut agar anggota dan masyarakat terhindar dari pengaruh organisasi keagamaan PKI. Propaganda PSII cabang Kabupaten Garut yang baik menjadi alasan dibalik suksesnya penyelenggaraan pendidikan

---

<sup>20</sup> Cokroaminoto, 1931:30.

<sup>21</sup> Olli, 2011:38.

<sup>22</sup> Shoelhi, 2012:42.

politik PSII cabang Kabupaten Garut, sehingga anggota dan masyarakat secara umum mulai tumbuh kesadaran mengenai pentingnya politik.

Kabupaten Garut pernah dilanda sebuah kerusuhan rasial anti Cina pada tahun 1963. Orang-orang PSII terlibat di dalam kerusuhan tersebut. PMI melakukan mobilisasi massa ke daerah-daerah yang menjadi basis PSII seperti Leles, Wanaraja, Banyuresmi, Cibiuk, Sukawening, Cisarupan, dan Samarang. PMI hanya tinggal berbicara dengan ajengan yang memimpin pesantren atau menyelenggarakan mimbar bebas untuk menarik masa ke pusat kota sebagai titik aksi. Kemudahan ini adalah hasil dari bentuk pendidikan politik yang beberapa tahun belakangan dilaksanakan. Bentuk-bentuk pendidikan politik ini bertahan sampai hari ini.